

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini berbicara mengenai konsistensi ataupun bantuan yang merupakan komitmen kebijakan luar negeri suatu pemerintah atau negara terhadap negara lain adalah sesuatu yang lazim yang merupakan sebuah hubungan antar negara-negara (hubungan internasional). dalam interaksi internasional merupakan hal yang wajar karena Kerjasama internasional sebagai akibat adanya saling ketergantungan, dengan menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional, yaitu terutama di upayakan untuk :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan prinsip persamaan hak, serta
3. Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan atau bersifat kemanusiaan.¹

¹ Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang mewajibkan Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Dalam perwujudan operasionalnya, politik luar negeri suatu negara senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Penyesuaian itu bagi Indonesia berarti aktif berperan dalam mengusahakan agar perubahan dan perkembangan itu mengarah kepada terwujudnya dunia yang lebih damai, lebih adil dan lebih sejahtera menuju sasaran-sasaran kepentingan nasional kita.²

Seperti halnya Konflik yang muncul di dunia Internasional tidak hanya melibatkan dua entitas negara yang sedang bertikai namun bahkan lebih. Seringkali konflik yang muncul turut di tangani oleh pihak ketiga baik berupa organisasi nasional di negara lain maupun negara-negara yang bernaung di bawah organisasi internasional untuk mendapatkan kesepakatan damai ataupun gencatan senjata. Organisasi internasional menjadi salah satu wadah dari bangsa-bangsa yang ada, dalam upaya penyelesaian konflik guna tercapainya perdamaian.

Berbicara mengenai isu atau konflik Internasional yang banyak mendapat perhatian dan respon Pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia menolak penjajahan di atas bumi, dan hal ini juga menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki hubungan dengan ekspektasi publik Indonesia. Salah satu keterkaitan tersebut adalah faktor masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, dimana konflik ini banyak melibatkan masyarakat muslim Palestina, di

² Djalal, Hasyim, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990*, CSIS, Jakarta, 1990. Cetakan Pertama, hal : 24

tambah lagi posisi mereka yang sama dengan Indonesia ketika mengalami penjajahan dulu. Yahudi Israel di anggap sebagai impererialis karena telah menduduki atau mencaplok sebagian wilayah Palestina sehingga banyak negara dari berbagai organisasi Nasional maupun Organisasi Internasional yang menaruh simpati pada konflik tersebut terutama Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang selalu konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.³

Melihat penjelasan singkat di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas *mengenai judul: Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Membantu Pemerintah Palestina Dalam Menghadapi Pendudukan Israel.*

Kebijakan Luar Negeri Indonesia tidak terlepas dari peran kepala Negara (Presiden). Menurut pandangan Mehdawi, Duta besar Palestina Farid N. Mehdawi, menjelaskan peran Pemerintah Indonesia terhadap Palestina di mulai dari Presiden pertama Indonesia Soekarno sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu :

Presiden pertama Indonesia Soekarno memberikan landasan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Pada masa Presiden Soekarno, Indonesia aktif dalam forum KAA (Konferensi Asia Afrika) dan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Dalam KKA Indonesia memimpin dalam upaya mendukung Palestina. KAA meningkatkan prestige Indonesia di mata dunia terutama di negara-negara di Asia dan Afrika. Dukungan Indonesia terhadap Palestina pada

³. Muhammad Faris Alfadh.2012.*Persepsi gerakan mahasiswa Islam terhadap politik luar negeri Indonesia di Timur tengah,Kitren ,KG II, Kota Gede, Yogyakarta:Prudent Media.* hal: 117-118.

masa Soekarno dinilai Mehdawi sebatas retorika. Karena Indonesia saat itu baru melakukan pembangunan pasca perang sehingga tidak dapat memberikan bantuan yang nyata terhadap Palestina, sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia sangat erat berhubungan dengan pihak Barat (Amerika Serikat dan sekutunya). Sementara Pemerintahan era Soeharto dinilai tidak aktif dalam melakukan politik luar negeri di kawasan Timur Tengah, terutama untuk penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada masa Soeharto lebih mendekati diri pada Barat. Presiden Soeharto memperkenalkan *open-door policy* dalam rangka untuk menarik arus bantuan asing dan investasi asing, namun dilihat dari sisi itu bukan berarti Soeharto meninggalkan Timur Tengah tanpa alasan, Hal tersebut dimaksudkan untuk rehabilitasi ekonomi nasional Pada tahun 1987. Pada saat itu juga Presiden Soeharto menerima kunjungan pimpinan PLO, Yasser Arafat. Dalam pertemuan ini, Yasser meminta dukungan Indonesia terhadap pendirian negara Palestina. Soeharto memberikan dukungan kepada Palestina. Maka pada tahun 1989 hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina mulai akrab ditandai dengan berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Setelah Kedutaan besar dibuka di Jakarta, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyatakan Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara, selama Israel tidak menyelesaikan permasalahannya dengan negara-negara di Timur Tengah. Mehdawi mengakui, Ali Alatas sangat gigih memperjuangkan Palestina untuk merdeka. Ali Alatas sangat tegas menolak hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Untuk konstruksi hubungan diplomasi dan dukungan Indonesia terhadap Palestina pada

masa pemerintahan Soeharto, dipandang tidak signifikan dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Palestina, sedangkan Pada masa pemerintahan BJ. Habibie, Abdurahman Wahid dan Megawati, dinilai tidak ada tindakan yang berarti dalam peningkatan hubungan Indonesia dan Palestina. Namun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat tindakan untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan Palestina. Menurut pandangan Mehdawi, Presiden Yudhoyono sangat efektif dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah Palestina. Selain itu, Yudhoyono memahami konstelasi politik internasional sehingga kebijakan luar negeri di bawah pemerintahannya menggambarkan kepemimpinannya yang stabil. Pada masa pemerintahan Yudhoyono periode pertama, pada 2006, Yudhoyono mendatangi Mehdawi dan menanyakan bentuk bantuan dari Indonesia yang dibutuhkan oleh Palestina. Menurut Mehdawi, tindakan tersebut cukup berkesan dan tulus untuk membantu Palestina. Sejak pertemuan tersebut, kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina cukup aktif dalam forum internasional menyuarakan perdamaian dan berdirinya Palestina sebagai negara yang berdaulat. Dalam kancah internasional, Indonesia aktif terlibat untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina. Pada tanggal 8-10 Juni 2009, Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan *United Nations Asian and Pacific Meeting on the Question of Palestine* dengan tema *Strengthening International Consensus on The Urgency of Achieving a Two-State Solution* (Pertemuan Regional). Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan *United Nations Forum of Civil Society in Support of the Palestinian People* (Forum Publik) pada tanggal 10 Mei 2009. Kedua pertemuan tersebut

merupakan program dari *Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People* (Komite Palestina) PBB dalam menjalankan mandatnya menggalang dukungan masyarakat internasional terhadap penyelesaian damai konflik Israel- Palestina 25 Januari 2013). Salah satu isi pidato Marty Natalegawa diantaranya berisi : “Dukungan Indonesia terhadap kehendak dan hak-hak rakyat Palestina untuk hidup secara bebas, damai, adil dan bermartabat di tanah air mereka, telah berlangsung cukup lama dan tidak akan pernah berhenti. Tentunya, Indonesia sangat mendukung keinginan Palestina untuk menjadi negara Anggota penuh PBB. Keanggotaan tersebut kiranya konsisten dengan visi solusi dua negara yaitu suatu solusi damai, adil dan komprehensif di Timur-Tengah”. Indonesia sebagai *co sponsor* pengajuan resolusi peningkatan status Palestina, cukup aktif melakukan pendekatan ke berbagai negara.

Indonesia pernah menjadi salah satu Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk berdirinya negara Palestina. Atas dorongan Indonesia, pada tanggal 16 Desember 2008, untuk pertama kalinya sejak tahun 2004, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi No. 1850 mengenai proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya konflik Israel dan Palestina. Selain pemerintah Indonesia yang pro aktif, berbagai kalangan diantaranya DPR maupun organisasi kemasyarakatan di Indonesia turut aktif dalam bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Salah satunya, pembangunan Rumah Sakit di jalur Gaza yang merupakan sumbangan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Indonesia pun

mengirimkan relawan ke Palestina, salah satunya bantuan melalui kapal Mavi Marmara, yang mengalami insiden penyadaraan oleh Israel.⁴

B. Rumusan Masalah

Melihat pemaparan di atas, maka permasalahannya adalah:

“Mengapa Pemerintah Indonesia Konsisten dalam Membantu Pemerintah Palestina dalam Menghadapi Pendudukan Israel?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana S1, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2. Secara umum penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konsistensi pemerintah indonesia dalam membantu Palestina atas Pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
3. Terlepas dari itu, Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menjadi bahan kajian bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang.

⁴https://www.academia.edu/4964281/Komunikasi_Internasional_Indonesia_Dalam_Upaya_Menukung_Palestina_Sebagai_Negara_Yang_Berdaulat_Tema_Komunikasi_Internasional_Indonesia_Dalam_Kancah_Global. di akses tgl 30- 06-2015.

D. Kerangka pemikiran

Dalam menjawab setiap permasalahan di butuhkan analisa yang berbentuk konsep atau teori. Berikut adalah teori yang penulis gunakan adalah:

1. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making process*) menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternative yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Menurut **William D.Coplin**, Teori pengambilan Keputusan Luar Negeri atau *Foreign Policy*, Yaitu:⁵

“ apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya,

⁵ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*,(Bandung ,Sinar Baru:1992) Hal:30.

tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.
- b. Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Kondisi Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri membawa dampak besar terhadap politik politik luar negeri di setiap negara. Terdapat hubungan para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi politik luar negeri mereka. Aktor-aktor politik tersebut dikenal sebagai "*policy influence system*" (sistem pengaruh kebijakan). Dalam membahas peran politik dalam penyusunan politik luar negeri dapat dibedakan dalam empat tipe *policy influencer* yaitu: 1. Partisan (partai politik yang mempengaruhi), 2. Birokrasi, 3. Kepentingan, 4. *Mass Influencer*.

Situasi Ekonomi dan Militer

Seakan-akan lingkungan dalam negeri tidak cukup rumit oleh adanya tuntutan dan persaingan di antara *Policy Influencer*, pengambil keputusan politik luar negeri harus pula mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika iya menyusun poitik luar negeri. Dia harus menyimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasan, yang di akibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer

Kemampuan ekonomi suatu negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri negara itu. Terdapat beberapa kreteria yang dapat membantu dalam menaksir kekuatan dan kelehaman ekonomi suatu negara tertentu, kreteria tersebut antara lain: 1, kapasitas produksi, 2, ketidakbergantungan relatif pada perdagangan dan finansial internasional.

Konteks Intenasional

Seperti yang halnya suatu negara berperilaku seperti yang dilakukanya, secara tradisional para analis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu, bagaimana negara tersebut akan berperilaku. Ada tiga elemen penting dalam dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, antara lain geografis, ekonomis, dan politis.⁶

Dalam tiga elemen tersebut di atas relevansinya dengan penelitian ini adalah yang pertama Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusia dalam hal ini,

⁶. *Ibid*

Indonesia dan Palestina mempunyai ikatan emosional, dan sama-sama mempunyai nasib yang mirip yaitu sama-sama pernah dijajah, maka sesuai dengan hukum Indonesia yang menolak negara imperalisme di muka bumi dalam studi kasus ini adalah pendudukan Israel atas tanah Palestina yang sama sekali bukan merupakan haknya, yang kedua, faktor ekonomi negara Timur-Tengah merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia maka dari itu Israel bersikap keras untuk mengambil serta menduduki tanah Palestina yang merupakan bagian dari wilayah Timur Tengah yang mempunyai geografis alam yang strategis kaya akan sumber daya alam tersebut, hal ini disebabkan karena melemahnya sistem militer negara Palestina dan juga Israel didukung oleh negara-negara super power seperti Amerika Serikat, hingga saat ini Israel terlihat tetap saja masih melakukan hal-hal yang tidak berperikemanusiaan dan tidak mengindahkan hukum internasional, tetapi dalam hal ini Indonesia selalu berupaya di negara-negara internasional untuk menggalang dukungan buat Palestina dan selalu konsisten menyuarakan perdamaian bagi negara Palestina hidup damai di atas tanah airnya sendiri.

E. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang ada, maka penulis menarik hipotesa:

Alasan Pemerintah Indonesia konsisten dalam membantu Pemerintah Palestina atas Pendudukan Israel antara lain:

Posisi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak kependudukan Israel atas Palestina adalah karena sesuai dengan amanat Konstitusi Indonesia di Pembukaan UUD 1945, secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan kolonialisme di atas muka bumi.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan sebuah penelitian terhadap suatu permasalahan atau fenomena maka diwajibkan ada batasan dan jangkauan yang jelas, dalam sekripsi ini penulis membatasi jangkauan pada kajian, faktor-faktor apa yang mendorong Pemerintah Indonesia konsisten dalam membantu Palestina dalam mempertahankan eksistensinya atas kependudukan Israel, serta pembahasan juga akan menyinggung kepentingan Indonesia atas Palestina dan Negara Arab lainnya.

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur dan hasil olahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan

fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, artikel, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membahas permasalahan secara sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab. Yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Pada BAB ini akan di uraikan dan dijelaskan bagian yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini yaitu: pendahuluan yang di dalamnya berisi alasan pemilihan judul sekaligus latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Hubungan Indonesia Palestina setelah Kemerdekaan

Pada BAB ini di uraikan mengenai Hubungan Indonesia Palestina sejak awal Kemerdekaan, di mulai dari sejarah dukungan palestina terhadap kedaulatan Indonesia, yang kedua menjeleskan tentang Hubungan

Diplomatik Indonesia Dan Palestina, yang ketiga, menjelaskan mengenai Tujuan Indonesia Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Palestina.

BAB III : Misi perdamaian Indonesia dalam Konflik Palestina Israel

Pada BAB ini akan penulis uraikan, yang pertama mengandung bagian yang penting yaitu Misi perdamaian Indonesia dalam konflik Palestina- Israel, yang kedua Komitmen Indonesia Terhadap Proses Perdamaian di Palestina dan Timur Tengah. Setelah itu penulis uraikan kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia yang tanpa batas tetapi tidak mengakui Israel, dan kemudian di bahas mengenai Problematika hubungan Indonesia Israel yang sampai sekarang Indonesia secara resmi belum menjalin hubungan yang akrab dengan negara Zionis penjajah Bangsa Palestina itu.

BAB IV: Motivasi Indonesia Konsisten mendukung Palestina mempertahankan Eksistensinya.

Dalam bab ini akan di bahas mengenai motivasi-motivasi apa saja yang sangat signifikan sehingga pemerintah indonesia konsisten mendukung pelestina mempertahankan eksistensinya.

BAB V : Kesimpulan

Pada Bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan atas penelitian yang di lakukan penulis.